

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL
MODERASI

(Studi Empiris pada SKPD Kota Tidore Kepulauan)

Nurjani Fara

nurfara_99@gmail.com

Rusman Soleman

Rusmansoleman8@gmail.com

Asrudin Hormati

as18091976@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate *¹

Abstract : This researcher the purpose to know: (1) The influence of internal control on the performance of local government; (2) The influence of financial management influential of regional with the local performance of the government; (3) The influence of organizational commitment to the relations between internal control with local performance government; (4) The influence of organizational commitment to the relations between local financial management with local performance government. This type of research is quantitative research. The population used is 25 SKPD in the City government Tidore Archipelago. Samples in this researcher be elected with used Slovin Method and there are 78 respondents in this researcher. Method of data analysis using multiple linear regression and moderating regression analysis (MRA) test who assisted with software SPSS 16.0.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah. (2) Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. (3) Pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara pengendalian intern dengan kinerja pemerintah daerah. (4) Pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah 25 SKPD di wilayah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 78 responden. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dan analisis regresi moderat (MRA) yang dibantu dengan software SPSS 16.0

Kata kunci: pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah, komitmen organisasi.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Bastian, 2007). Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN, 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah (Rohman, 2007).

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Dikutip dari website www.tidorekota.go.id hasil pemeriksaan BPK terhadap sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2014 menunjukkan hasil opini yang meningkat dari tahun anggaran 2013 dengan opini wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian. Tetapi, disisi lain faktanya dilapangan disaat pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terindikasi adanya kerugian negara/daerah, sehingga harus diberi deadline waktu selama 60 hari untuk dilakukan pembenahan ulang. Temuan BPK terkait penggelapan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) 359 kendaraan senilai Rp 1,12 miliar yang terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Berdasarkan hasil koordinasi BPK dengan pihak UPTD Samsat diketahui Rp 522,55 juta dari 163 unit kendaraan tak disetorkan ke kas daerah.

Penerimaan BBN-KB yang tak disetorkan digunakan untuk biaya operasional, biaya transportasi, dan sumbangan. Sisanya sebanyak 196 kendaraan dengan nilai Rp 603,32 juta tidak pernah diproses BBN-KB-nya dan tidak pernah diterima pembayarannya dari pihak dealer. BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelemahan sistem pengendalian intern

terjadi pada pengelolaan PBB pedesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di Kota Tidore Kepulauan. Lemahnya pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintah daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah.

Di samping itu, akibat lemahnya pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintah daerah terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah sehingga berdampak pada anggaran daerah yang begitu besar.

Pengendalian Intern yang lemah ataupun longgar merupakan salah satu faktor yang paling mengakibatkan kecurangan tersebut sering terjadi. Pengendalian Intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai (Halim, 2007). Pengendalian Intern memerlukan pengawasan untuk memastikan Pengendalian Internal dapat berjalan secara efektif. Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Effendi, 2005).

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. pengawasan intern merupakan suatu alat pengawasan dari pemimpin

organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana-rencana dan kebijakan yang telah ditentukan (Wawan dan Lia, 2009).

Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolok ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2004).

Widiyanti, dkk (2010) setiap organisasi memiliki tujuan untuk mencapai kinerja yang optimal tidak terlepas dari kepuasan kerja aparat pemerintah daerah dan komitmen organisasi, sebagai bentuk profesionalisme pegawai pemerintah dalam tugas dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan, sangat diperlukan bagi terwujudnya kualitas kinerja aparatur negara yang berorientasi pada mutu pelayanan publik. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggung jawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Peningkatan kinerja pemerintah daerah merupakan hal yang komprehensif dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/dinas/biro/kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki.

Permasalahan dalam tulisan ini yaitu pengendalian internal dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Serta komitmen organisasi terhadap hubungan antara pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah dan bagaimana komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah?

Pengendalian Intern

Charles dan Walter (2007) pengendalian internal adalah rencana organisasional dan semua tindakan terkait yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2001) pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penaksiran resiko, 3. Aktivitas pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi dan 5. Pemantauan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Halim (2007) bahwa keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5 yaitu keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok.

Menurut Simanjuntak (2005), Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak (2005) juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Komitmen Organisasi

Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif sehingga pada akhirnya juga lebih menguntungkan bagi organisasi. Mowday, dkk (1982) mengatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Griffin, 2004). Komitmen organisasi yang menjadi tolok ukur

sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Memberikan pekerjaan individu yang nilainya tidak selaras dengan nilai dalam organisasi yang ada, maka akan cenderung menghasilkan karyawan tidak memiliki motivasi dan komitmen, serta yang tidak terpuaskan oleh pekerjaan mereka dan organisasi tersebut (Sumarno, 2005). Dengan mempunyai komitmen organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang baik sesuai dengan yang diharapkan.

Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Prasetyono dan Kompyurini (2007) meneliti tentang analisis kinerja rumah sakit daerah dengan pendekatan balace scorecard berdasarkan komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, hasil penelitiannya menunjukkan secara simultan bahwa komitmen organisasi, pengendalian intern dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja rumah sakit, kemudian secara parsial komitmen organisasi, pengendalian intern dan prinsip-prinsip good corporate governance berhubungan positif tetapi tidak begitu signifikan.

Laporan pengendalian merupakan proses kinerja, pemeriksa eksternal memeriksa akuntansi keuangan, dan komite audit terlibat dalam meyakinkan ketetapan dan pelaporan tentang informasi internal dan eksternal. Organisasi memberikan informasi keuangan dan operasional kepada pemegang saham dan 56 stakeholders untuk

pengambilan keputusan. Penelitian mengenai pengendalian intern telah dilakukan beberapa peneliti, diantaranya oleh Tugiman (2000), membuktikan bahwa secara kuantitatif pengendalian intern dalam organisasi sangat signifikan pengaruhnya dalam rangka pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Selain itu, pelaksanaan pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Rohman (2007) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja, terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan. Keterkaitan tersebut dapat memudahkan perencanaan yang bersifat menyeluruh, baik dari segi pencapaian sasaran, perumusan dan implementasi program, kegiatan, maupun proses penetapan dan pengendalian anggaran serta analisis kinerja.

Peran menunjukkan partisipasi seseorang dalam mencapai tujuan organisasi. Peran manajerial pengelolaan keuangan daerah memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pengelolaan keuangan daerah untuk berpartisipasi dalam menyusun

anggaran, sehingga memberi rasa tanggungjawab dan mendorong kreativitas pengelolaan keuangan daerah. Individu yang terlibat dan diberi tanggungjawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin tinggi (Hansen dan Mowen, 2006).

Rohman (2009) tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan intern dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah). Dengan menggunakan analisis jalur (path analysis), penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi dan memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada Pemerintah daerah di Jawa Tengah. Selain itu implementasi sistem akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah.

Komitmen organisasi terhadap hubungan antara pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah

Komitmen adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2006) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Vano (2009) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja.

Komitmen organisasi menurut Robbins (2008) adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Apabila

setiap pegawai memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaiknya bagi negara dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka tentunya kinerja sektor publik akan meningkat.

Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

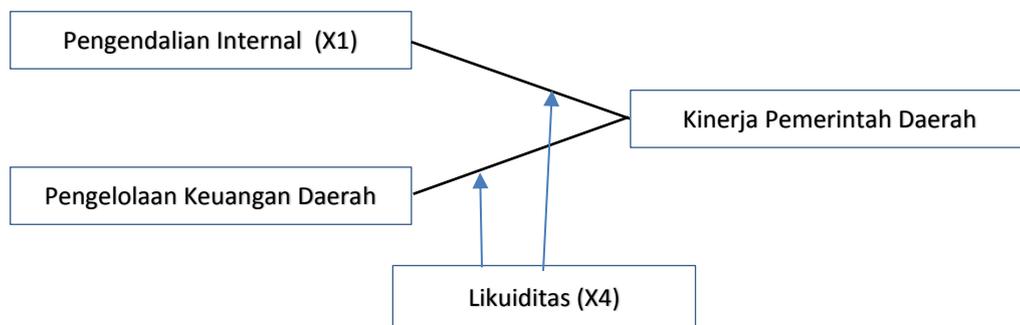
Komitmen organisasi merupakan dorongan yang tercipta dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat meningkatkan keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Karena pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempat bekerja dan dapat menghasilkan kinerja yang baik pada organisasi tersebut.

Robbins (2008), juga menyebutkan tiga indikator yang bisa digunakan untuk mengukur Komitmen Organisasi, yaitu : 1. Komponen afektif (*affective commitment*), komitmen yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Seseorang ingin berada dalam suatu organisasi karena keinginan yang timbul dari diri sendiri.

2. komponen normatif (*continuance commitment*), komitmen yang timbul karena adanya kebutuhan rasional. Komitmen ini muncul atas dasar untung rugi, dipertimbangkan hal apa yang harus dikorbankan bila akan menetap didalam suatu organisasi.

3. Komponen berkelanjutan (*normative Commitment*), komitmen yang bersumber pada norma yang ada dalam diri individu, yang berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi, dirinya merasa harus bertahan karena alasan loyalitas.

Robbins (2008) mendefinisikan komitmen pada organisasi yaitu sampai tingkat mana seorang karyawan memihak suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain semakin tinggi komitmen seseorang terhadap perusahaan akan berdampak pada kemauan untuk menjalankan kegiatan lain yang harus dilakukan tanpa mempertimbangkan imbalan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi seorang karyawan maka semakin rendah pula nilai keinginan pindah kerja ke perusahaan lain.



Gambar. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini dilakukan terhadap para pejabat daerah yang menduduki posisi sebagai pimpinan level menengah yaitu eselon III dan pimpinan level bawah yaitu eselon IV di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah daerah kota Tidore Kepulauan yang secara teknis terlibat dalam penilaian kinerja dan penentuan kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Jumlah keseluruhan SKPD yang ada pada pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah 37 SKPD. Populasi dari penelitian ini adalah pimpinan SKPD pada level menengah dan pimpinan level bawah pada pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian adalah 25 (dua puluh lima) SKPD yang terdiri dari: dinas, badan, kantor, inspektorat dan rumah sakit. Jumlah sampel yang akan dijadikan responden untuk 25 SKPD sebanyak 78 orang yang terdiri dari: pimpinan level menengah sebanyak 25 orang dan pimpinan level bawah sebanyak 53 orang. Pengambilan sampel untuk setiap SKPD sesuai dengan proporsi masing-masing SKPD berdasarkan teknik pengambilan sampel.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner pada instansi pemerintah terkait.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik angket (kuesioner) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya dalam setiap pertanyaan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian kualitas data dan melakukan pengujian asumsi klasik. Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Purbayu, 2005). Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen. Pengukuran dikatakan valid jika pengukur tujuannya dengan nyata atau benar.

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Product Correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai *r*-hitung yang merupakan nilai *Corrected item- total Correlation* > dari *r*-tabel pada signifikansi 0.05 (5%).

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005) Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS versi 16 merupakan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikata

Pengendalian Intern

Merupakan rencana, metoda, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang

memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain. Variabel Pengendalian Intern diukur dengan kuesioner yang digunakan oleh Pangastuti (2008) yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan 7 (tujuh) alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), agak setuju (AS), tidak pasti (TP), agak tidak setuju (ATS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS)

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka anggaran dan belanja daerah. Tujuan tercapainya pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerah. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah diukur dengan kuesioner yang digunakan oleh Ngatemin (2009) dan Wulandari (2013) yang terdiri dari 7 item pertanyaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan 7 (tujuh) alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), agak setuju (AS), tidak pasti (TP), agak tidak setuju (ATS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi. Variabel Kinerja

Pemerintah Daerah diukur dengan kuesioner yang digunakan oleh Mahoney dalam Ramandei (2009) yang terdiri dari 7 item pertanyaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan 7 (tujuh) alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), agak setuju (AS), tidak pasti (TP), agak tidak setuju (ATS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Komitmen organisasi

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Variabel Komitmen Organisasi diukur dengan kuesioner yang digunakan oleh Ngatemin 2009 dan Wulandari (2013) yang terdiri dari 7 item pertanyaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan 7 (tujuh) alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), agak setuju (AS), tidak pasti (TP), agak tidak setuju (ATS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah otonomi hasil pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara. Wilayah administrasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan terbagi atas 8 kecamatan dan 72 kelurahan/desa, dimana sebanyak 52 kelurahan/desa merupakan desa pesisir.

Objek penelitian ini adalah para pejabat daerah yang menduduki posisi di tiap-tiap SKPD sebagai pimpinan level menengah yaitu eselon III, dan pimpinan level bawah yaitu eselon IV pada pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Jumlah kuesioner yang tersebar

ke masing-masing SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah 78 kuesioner. Penyebaran kuesioner dimulai pada bulan februari 2017, sedangkan waktu pengembalian dan pengumpulan data kuesioner dari responden dilakukan sampai dengan akhir bulan maret 2017. Kuesioner ini disebar ke 25 SKPD dengan perincian 13 Dinas, 9 Badan, 2 Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dari 78 kuesioner yang disebar, sebanyak 7 kuesioner yang tidak dikembalikan karena alasan pegawai tidak berada di tempat dan 5 kuesioner yang

nilai *tolerance* yang lebih besar dari kriteria yang digunakan dan nilai VIF yang lebih kecil dari kriterianya untuk seluruh variabel. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen dan seluruh variabel moderasi. memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinieritas.

pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatter plot* bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji dari spearman's rho bahwa nilai korelasi antara variabel independen dengan *unstandardized residual* memiliki nilai

rusak karena kuesioner tidak diisi secara lengkap. Oleh karena itu jumlah data yang bisa diolah untuk analisis adalah sebanyak 66 kuesioner. Untuk lebih jelasnya mengenai responden penelitian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Sedangkan pengujian Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam Tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari

signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi

Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan Tabel Hasil Regresi nilai-nilai koefisien adjusted R square dan koefisien korelasi menunjukan angka yang cukup baik untuk penelitian yang menggunakan data primer. Tabel tersebut menunjukan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.622 yang menunjukan bahwa hubungan antara variabel independen yaitu variabel pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah dengan variabel dependen kinerja pemerintah daerah menunjukan adanya korelasi.

Tabel 1. Hasil Analisa Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T hitung	Sign.
Konstanta	-3.503	-446	0.657
Pengendalian Intern (X1)	0.305	1.658	0.102
Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	0.768	5.208	0.000
R	0.622		
R Square			
Adjust R Square	0.367		
F Hitung			
Sign.			
N			

Sumber: data yg diolah (2017)

Nilai adjust R Square sebesar 0.367 yang berarti bahwa variasi variabel independen yaitu pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama sebesar 38,7% sedangkan sisanya sebesar 61,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

$$Y = -3.503 + 305 \text{ PI} + 768 \text{ KPD} + e \dots\dots\dots 1$$

Nilai konstanta negatif sebesar (-3.503), artinya jika nilai PI (X₁), PKD (X₂), bernilai nol, maka jumlah kinerja (Y) bernilai negatif sebesar -3.503. Variabel pengendalian intern memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0.305 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pengendalian intern (X₁) akan dapat menurunkan kinerja pemerintah daerah (Y) sebesar koefisien regresi. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai T sebesar 1.658 dan nilai signifikan sebesar 0.102 yang lebih besar dari $\alpha=0,05$. Hal ini berarti pengendalian intern berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini berarti hipotesis pertama ditolak.

Variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0.768 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah (X₂) akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Y) sebesar koefisien korelasi. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai T sebesar 5.208 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Hal ini berarti pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini berarti hipotesis kedua diterima. Untuk itu secara statistik H₂ dapat diterima, artinya hipotesis yang menyatakan pengelolaan keuangan

daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dibuktikan kebenarannya sehingga hipotesis tersebut tidak dapat ditolak.

Hipotesis ketiga dimaksudkan untuk menguji pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi menggunakan uji nilai selisih mutlak, hasilnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Berdasarkan Tabel dibawah ini dapat dibuat suatu model persamaan regresi dengan nilai selisih mutlak yaitu sebagai berikut:

$$Y = 60.278 - 704 \text{ PI} - 898 \text{ M} + 0.029 \text{ Mod1} + e$$

Tabel 2 menunjukkan variabel kinerja pemerintah daerah bernilai signifikan sebesar 0.778 yang berada di atas standar signifikansi (0,05) dan koefisien variabel bernilai positif sebesar 0,029. Hasil menandakan H₃ ditolak. Hal ini berarti komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara pengendalian intern dengan kinerja pemerintah daerah.

Hipotesis keempat dimaksudkan untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi menggunakan uji nilai selisih mutlak, dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan tabel 3 dapat dibuat suatu model persamaan regresi dengan nilai selisih mutlak yaitu sebagai berikut:

$$Y = 312.560 - 6.435 \text{ PKD} - 7.050 \text{ M} + 0.167 \text{ Mod2}$$

Variabel kinerja pemerintah daerah bernilai signifikan sebesar 0.017 yang berada di atas standar signifikansi (0,05) dan koefisien variabel bernilai positif sebesar 0.167. Hasil menandakan H₄ ditolak. Hal ini berarti komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2: Analisa Regresi Variabel Moderasi

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien		
		Regresi	T hitung	Sign.
	ZPI	-704	-161	0.872
	ZM	-898	-229	0.819
	(ZPI_ZM)	0.029	0.283	0.778
Konstanta				
R				
R Square				
Adjust R Square				
F Hitung				
Sign.				
N				

Sumber: data yg diolah (2017)

Tabel 3: Hasil Uji Regresi Variabel Moderasi

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien	T hitung	Sig
		Regresi		n.
	ZPKD	-6.435	-2.175	0.03
	ZM	-7.050	-2.404	0.01
	(ZPKD_ZM)	0.167	2.459	0.01
Konstanta				
R				
R Square				
Adjust R Square				
F Hitung				
Sign.				
N				

Sumber: data primer yg diolah (2017)

PEMBAHASAN

Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengaruh pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Karena dilihat dari pelaksanaan pengendalian intern terhadap kinerja masing-masing SKPD belum penting untuk dilakukan, dilihat dari jawaban responden melalui kuesioner yang dibagikan.

Pengendalian Internal dalam penelitian ini merupakan proses yang terdapat dalam organisasi, dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam organisasi sudah sesuai

dengan standar kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian Intern ini terkait dengan bagaimana individu dalam instansi melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang, kebijakan, dan otoritas yang ada, secara bersama-sama, guna mencapai tujuan instansi. Pengendalian Intern yang berjalan dengan efektif dan efisien, secara optimal, akan membawa dampak yang baik pada kinerja pegawai, terutama pada pegawai bidang keuangan pemerintah daerah, untuk menghasilkan kinerja yang semakin baik.

Pengendalian intern ini dapat pula digambarkan melalui penetapan tujuan. Dimana hubungan antara teori penetapan tujuan dengan variabel pengendalian intern ini adalah Pertama, penetapan tujuan dapat

mengarahkan perhatian individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Kedua, adanya tujuan dapat meningkatkan ketekunan individu dalam mencapai tujuan tersebut. Ketiga, tujuan membantu individu untuk menetapkan strategi dan melakukan tindakan sesuai yang direncanakan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Rohman, 2007) meneliti tentang pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2004) yang menemukan bahwa pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk kepada pihak kepala daerah yang berwenang agar dapat lebih mempertimbangkan kompetensi aparatur pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka anggaran dan belanja daerah. Tujuan tercapainya pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dihadapi oleh pimpinan ini dapat pula digambarkan melalui teori penetapan tujuan. Dengan adanya teori penetapan tujuan digunakan untuk menjelaskan tindakan bawahan dalam mewujudkan tujuan yang diharapkannya. Tujuan individu akan menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukannya, semakin tinggi komitmen seorang individu akan mendorong individu tersebut untuk melakukan usaha yang lebih keras. Kesimpulannya bahwa kebijakan yang dilakukan akan berpengaruh pada kepercayaan atasan terhadap karyawannya.

Tuasikal (2006) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah hasil penelitian ini dapat memberikan petunjuk kepada pihak kepala daerah ataupun pihak pejabat yang berwenang, agar dapat lebih mempertimbangkan kompetensi aparatur pemerintah daerah ditinjau dari segi pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan bermoral dari pada mempertimbangkan politik sebagai balas jasa atas pengangkatan pejabat dalam menduduki posisi tertentu yang strategis, sehingga di dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai khususnya pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila pengelolaan keuangan dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tuasikal, 2006) yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah semakin baik

Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Karena dilihat dari pelaksanaan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dianggap belum penting untuk dilakukan, karena dilihat dari jawaban responden melalui kuesioner yang dibagikan.

Komitmen organisasi dalam penelitian ini merupakan dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Griffin, 2004). Komitmen organisasi yang menjadi tolok ukur sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Memberikan pekerjaan individu yang nilainya tidak selaras dengan nilai dalam organisasi yang ada, maka akan cenderung menghasilkan karyawan tidak memiliki motivasi dan komitmen, serta yang tidak terpuaskan oleh pekerjaan mereka dan organisasi tersebut (Sumarno, 2005).

Pendekatan teori kontigensi mengemukakan bahwa situasi dapat dikategorikan dengan tiga faktor; hubungan pemimpin bawahan, struktur kinerja, dan kekuatan posisi. Hubungan pimpinan bawahan merujuk kepada atmosfer kelompok dan kepercayaan diri, kesetiaan, dan interaksi mereka. Struktur kinerja lebih ditekankan kepada optimalisasi kinerja. Beberapa pertimbangan kerja dapat dikatakan terstruktur bila : (1) Persyaratan kinerja/tugas itu harus jelas dan diketahui, (2) Pola penyelesaian kerja mempunyai banyak alternatif dan (3) Penyelesaian kerja dapat diimplementasikan dengan mudah.

Hasil penelitian mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2004) yang menemukan bahwa pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dianggap belum penting untuk dilakukan, karena dilihat dari jawaban responden melalui kuesioner yang dibagikan.

Pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka anggaran dan belanja daerah. Tujuan tercapainya pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dihadapi oleh pimpinan ini dapat pula digambarkan melalui teori kontingensi. Teori kontingensi adalah teori kesesuaian-pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori kontigensi mengemukakan bahwa situasi dapat dikategorikan dengan tiga faktor; hubungan pemimpin bawahan, struktur kinerja, dan kekuatan posisi. Hubungan

pimpinan bawahan merujuk kepada atmosfer kelompok dan kepercayaan diri, kesetiaan, dan interaksi mereka. Struktur kinerja lebih ditekankan kepada optimalisasi kinerja. Beberapa pertimbangan kerja dapat dikatakan terstruktur bila: (1) Persyaratan kinerja/tugas itu harus jelas dan diketahui, (2) Pola penyelesaian kerja mempunyai banyak alternatif dan (3) Penyelesaian kerja dapat diimplementasikan dengan mudah.

Hasil dari penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryanawa, 2008) menguji tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada SKDP dinas Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi penyusunan anggaran terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial dan interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian ini variabel moderasi yang digunakan yaitu variabel moderasi potensial. Hal ini berarti pada setiap instansi belum memiliki komitmen yang tinggi pada masing-masing karyawan. Mereka lebih menganggap segala pencapaian berasal dari kerja keras dan keahliannya sendiri.
4. Komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian ini

variabel moderasi yang digunakan yaitu variabel moderasi potensial. Variabel potensial moderasi merupakan variabel yang ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Hal ini berarti karyawan masih tetap mempertahankan usaha dan kerja keras yang mereka lakukan tidak terlalu sibuk berpikir untuk mencari dan memilih situasi yang aman dan menguntungkan dalam organisasinya.

Penelitian mendatang sebaiknya menambah dimensi yang ada dalam masing-masing konstruk sehingga pengujian terhadap konstruk dapat dilakukan secara mendetail. Hal tersebut akan menambah jelas hasil penelitian masing-masing konstruk. Menggunakan variabel lain atau menambahkan variabel independen yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Dan kemudian Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan dan menambah jumlah sampel yang diteliti sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat analisis lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arman Hakim. 2006. *Manajemen industri*. Yogyakarta: madpres
- Ashari, Purbayu Budi Santoso. 2005. *Analisis statistik dengan Microsoft excel dan SPSS*. Yogyakarta.
- Azhar, Susanto. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi I; Pendekatan Manual Penyusunan Metode dan Prosedur*. Bandung: Lingga Jaya.
- Bastian, Indra, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Bryan, J. dan E. A. Locke. 1967, *Goal Setting as a Means of Increasing*

- Motivation, *The of Applied Psychology*, (June): 274-277.
- Chabib Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Fokus Media: Bandung Charles T.Horngren dan Walter T.Harrison. (2007), "Akuntansi jilid Satu". Edisi Tujuh, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Effendi, 2005. Peranan Komite Audit Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan, *Jurnal Ilmiah*, Vol.1 No.1
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Govindarajan, V. 1986. "Impact of Participation in the Budgetary Process on Management Attitudes and Performance : Universalistic and Contingency Perspectives". *Decision Sciences*.
- Griffin, R.W. 2004. *Manajemen*. Edisi Ketujuh, Jakarta: Erlangga.
- Guritno, Bambang dan Waridin. 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja.
- Halim, A. dan T. Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hansen, Don R. Dan Maryanne M. Mowen. 2006. *Akuntansi Manajemen*. Buku 2. Erlangga, Jakarta.
- Herlin, K.L. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Independensi pada Kinerja Organisasi dengan Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Intervening. *E-journal Universitas Islam Indonesia*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2001. *standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta : Salemba Empat.
- LAN-BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LAN-RI.
- Locke, dkk. 1996. *Goal-setting as a means of increasing motivation*. *Journal of Applied Psychology*, 51, 274-277.
- Mangkunegara, A. 2007. *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moh. As'ad, 2003, *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mathis, Robert L. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mowday, R.T., dkk. 1979. *The measurement of organizational commitment*. *Journal of Vocational Behavior*
- Natalia, Dewinda. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi*: Universitas Diponegoro Semarang. (tidak di publikasi)
- Pangastuti, M. D, 2008. "Pengaruh Partisipasi Penganggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajemen Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator (Studi Pada Kabupaten Timor Tengah Utara)." Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang. (tidak di publikasi)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2007. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Prinsip, Norma, Azas dan Landasan Umum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- Prasetyono dan Kompyurini. 2007. Analisis Kinerja Rumah Sakit dengan pendekatan Balanced Scorecard berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern and Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Makasar : *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi Indonesia*: Konsep Kontroversi, Aplikasi, Alih Bahasa : Hidayana Pujatmaka. Jakarta : Prehalindu

- Rogers, Stave, 1990, *Performance Management in Local Government*, Jessica Kindsley Publisher, London
- Rohman, Abdul. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Maksi* Vol 7 No.2 ISSN: 1412-6680
- Sevilla. 1960. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta : Universitas Indonesia
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Siregar, Astuti Handaiyani dan I Ketut Suryanawa. 2008. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individual Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Sumarno, J. 2005. "Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial." *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Unhas Makasar
- Tuasikal, A. 2006. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku). Universitas Padjajaran Bandung. (*Disertasi Tidak Dipublikasikan*)
- Tugiman, Hiro. 2000. Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor-Faktor Pendukungnya Terhadap Peningkatan Pengendalian Internal Dan Kinerja Perusahaan. Disertasi Doktor. Universitas Padjajaran: Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dengan Daerah
- Wahyudi Bambang. 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, penerbit Bandung.
- Wawan dan Lia. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya) *Jurnal Akuntansi FE Unsil*.
- Widhi, Saputro Nugroho. 2014. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman *Good Governance* terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. *E- journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 6(10), h: 89-106.
- Zalin, Fitri. 2013. Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Study empiris pada DPKD Pemerintah Kota di Sumatera Barat). Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Skripsi. (tidak di publikasi)
- www.tidorekota.go.id